



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MOKHAMMAD NAJIKH
2. Jabatan : SEKRETARIS DPRD
3. NHK : 412359

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **18.950.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/300 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 336 m2/700 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/250 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 350 m2/170 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 362 m2/362 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 330 m2/330 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 1486 m2/1486 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 3.250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **408.000.000**

1. MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, HONDA PENUMPANG Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000



3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI

Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 670.693.766

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 20.028.693.766

III. HUTANG

Rp. 190.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 19.838.693.766

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.